

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Meskipun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah melaksanakan Program Jemput Bola (Jebol) sebagai strategi untuk meningkatkan aktivasi IKD, capaian aktivasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Jemput Bola dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat di Kota Yogyakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian didasarkan pada teori efektivitas Edy Sutrisno (2010) yang meliputi lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selain itu, teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) digunakan sebagai teori pendukung melalui dimensi content of policy dan context of implementation untuk menjelaskan proses pelaksanaan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jemput Bola belum efektif dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kota Yogyakarta. Dari lima indikator efektivitas, ketepatan waktu telah berjalan dengan baik, sedangkan pemahaman program, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata masih belum optimal. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Grindle, isi kebijakan (content of policy) telah dirancang dengan jelas melalui tujuan, sasaran, pelaksana, serta sumber daya yang memadai. Namun, pada konteks implementasi (context of implementation) masih ditemukan berbagai kendala, seperti penyebaran informasi yang belum merata, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan perangkat pendukung, kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan KTP elektronik fisik, serta belum luasnya pemanfaatan IKD dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas Program Jemput Bola memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta perluasan implementasi IKD pada berbagai layanan publik.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Jemput Bola, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

This study is motivated by the government's effort to accelerate the digital transformation of population administration services through the implementation of the Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD). Although the Population and Civil Registration Office of Yogyakarta City has implemented the Mobile Service Program (Program Jemput Bola) as a strategy to increase IKD activation, the activation rate has not yet achieved the expected target. This study aims to analyze the implementation of the Mobile Service Program in increasing Digital Population Identity activation among the people of Yogyakarta City and to identify the factors influencing the program's effectiveness.

This study employed a qualitative research method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing. The analysis was based on Edy Sutrisno's (2010) effectiveness theory, which includes five indicators: program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real change. In addition, Merilee S. Grindle's (1980) policy implementation theory was used as a supporting framework through the dimensions of content of policy and context of implementation to explain the implementation process.

The findings indicate that the Mobile Service Program has not yet been effective in increasing IKD activation in Yogyakarta City. Of the five effectiveness indicators, timeliness has been achieved, while program understanding, target accuracy, goal achievement, and real change remain insufficient. Based on Grindle's policy implementation theory, the content of policy has been well designed, including clear objectives, target groups, implementing actors, and adequate resources. However, the context of implementation still faces several challenges, including uneven dissemination of information, low levels of digital literacy, limited supporting devices, the community's continued preference for physical identity cards, and the limited utilization of IKD across public services. Therefore, improving the effectiveness of the Mobile Service Program requires strengthening public outreach, enhancing digital literacy, and expanding the implementation of IKD in various public services.

Keywords: Effectiveness, Mobile Service Program, Digital Population Identity, Policy Implementation, Public Service.